

	News Title : Investor Kripto di Indonesia Sentuh 18,5 Juta	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Gagas Yoga Pratomo
	Publish Date : 31 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Crypto	Topic : Kripto

Home > Crypto

Investor Kripto di Indonesia Sentuh 18,5 Juta



Gagas Yoga Pratomo
Diperbarui 31 Jan 2024, 17:30 WIB



Share
10



Tokocrypto Crypto Outlook 2024, Rabu (31/1/2024). (Foto: Liputan6.com/Gagas YP)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Sanjaya mengungkapkan data terbaru investor kripto di Indonesia mencapai 18,5 juta per Desember 2023.

Menurut Tirta, jumlah ini presentasinya cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia sekitar 277 juta. Adapun saat ini Bappebti telah mengizinkan 501 aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh exchanger.

BACA JUGA: Saham Perusahaan Penambang Bitcoin GRID Anjlok Usai Tercatat di Nasdaq

"Saat ini perdagangan masih kita batasi 501 aset kripto. Di coinmarketcap ada sekitar 11.000 aset kripto, tetapi tidak semua masyarakat mau bertransaksi dengan koin sebanyak itu," kata Tirta dalam acara Tokocrypto Crypto Outlook 2024, Rabu (31/1/2024).

Tirta menuturkan, Bappebti akan memilih aset kripto sesuai dengan permintaan masyarakat dan juga exchanger kripto. Sebagai regulator yang masih mengawasi aset kripto, Bappebti akan membuat regulasi yang mengikuti perkembangan produk aset kripto.

Seperti diketahui, hingga saat ini Indonesia hanya memperbolehkan perdagangan spot untuk aset kripto, sedangkan secara global sudah banyak perkembangan produk kripto salah satunya derivatif.

Terkait peralihan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta mengungkapkan regulator akan berkolaborasi dalam membangun regulasi untuk aset kripto.

"Saat ini masih ada kesempatan memperbaiki regulasi dan memperkuat. Ketika beralih harusnya lebih diperkuat lagi. Mungkin ada beberapa regulasi dalam lingkup wewenang Bappebti belum bisa diakomodir semoga bisa diakomodir oleh OJK," pungkas Tirta.